

DIGITALISASI BERBASIS MASYARAKAT DI DESA TEBING DAN DESA TUIK SERTA WARGA BELAJAR PKBM BINA BANGSA KABUPATEN BANGKA BARAT, BANGKA BELITUNG

Atikah Dewi Utami

atikahdewi.utami93@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Gustin

gustin@iainsasbabel.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Amrullah

mramsulaiman@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Dody Irawan

dodayexcellent@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Abstract

By providing digitalization knowledge and training to residents in Tebing Village, Tuik Village, and PKBM Bina Bangsa Learning Residents, it is hoped that they will be able to overcome obstacles and problems in the village development process. The method used is PAR (Participatory Action Research), its implementation is carried out by analyzing several stages, namely preparation, implementation and evaluation. The results of the implementation of this activity showed that before the implementation of the activity, residents in Tebing Village, Tuik Village and PKBM Bina Bangsa Learning Community did not understand digitalization. However, after the implementation of the activity carried out by residents showed the increasing knowledge and competence in computer operation, especially as proven through post-test results. It is hoped that this research can provide information as a basis for consideration, support, and contribution of thought to decision makers in increasing digital-based competencies in order to improve public services to the community.

Keywords: *Digitalization of Villages, Society, Community Service*

Abstrak

Dengan diberikannya pengetahuan dan pelatihan digitalisasi kepada warga masyarakat di Desa Tebing, Desa Tuik, dan Warga Belajar PKBM Bina Bangsa diharapkan mampu mengatasi kendala dan permasalahan dalam proses pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah PAR (Participatory Action Research), dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menganalisis beberapa tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil dari pelaksanaan kegiatan

ini menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan warga masyarakat di Desa Tebing, Desa Tuik dan Warga Belajar PKBM Bina Bangsa, kurang memahami mengenai digitalisasi. Namun, setelah pelaksanaan kegiatan diterapkan kepada warga ataupun masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan serta kompetensi pengoperasian komputer khususnya yang dibuktikan melalui hasil uji post-test. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai dasar pertimbangan, pendukung, dan sumbangan pemikiran kepada pengambil keputusan dalam peningkatan kompetensi berbasis digital guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kata kunci : *Digitalisasi Desa, Masyarakat, Pengabdian pada masyarakat*

Received: 22-02-2024; Accepted: 13-07-2024; Published: 14-07-2024

A. Pendahuluan

Transformasi digital yang sedang terjadi saat ini telah membawa dampak besar pada kehidupan manusia, termasuk di desa-desa. Banyaknya desa yang belum terkoneksi dengan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan kesenjangan antara desa dan kota semakin besar. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada akses informasi dan pengetahuan masyarakat desa, tetapi juga pada pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah desa. Pengembangan desa digital menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Adanya desa digital, pemerintah desa dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, serta mempermudah akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat desa¹. Namun, pengembangan desa digital juga menghadapi beberapa tantangan, di antaranya adalah kurangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di daerah pedesaan, kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola teknologi informasi, serta minimnya dukungan dan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pengembangan desa digital.

Masyarakat di Desa Tebing Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat secara umum memiliki karakteristik yang homogen, baik itu dari sisi mata pencaharian, agama, adat istiadat serta menjunjung tinggi pelaksanaan gotong royong. Namun, hal ini tentunya tidak terlepas dari akan adanya gejala – gejala sosial khususnya dari sisi pengelolaan teknologi

¹ Aftina Nurul Husna and others, *Memberdayakan Masyarakat Digital* (Unimma Press, 2021).

informasi yang kurang optimal sehingga jika dibiarkan tentu akan berdampak pada kontroversi, kompetisi, dan sistem nilai kebudayaan yang negatif. Dari sisi pengetahuan teknologi, informasi dan komunikasi khususnya bagi kinerja perangkat desa Tebing masih belum optimal sehingga program menuju desa digital ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk pengembangan suatu desa dan pemerintahan desa khususnya memiliki peran strategis untuk mewujudkan desa digital dan masyarakat yang melek teknologi kekinian.

Warga belajar PKBM Bina Bangsa itu sendiri memiliki peran strategis dalam membantu menuju desa digital di daerahnya masing-masing. Melalui program pengabdian masyarakat yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mensukseskan masyarakat melek digitalisasi. PKBM Bina Bangsa telah melakukan MoU atau perjanjian kerjasama dengan program studi Jurnalistik Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebelumnya sehingga program yang dilakukan oleh peneliti bersama *stakeholder* terkait tentunya akan sangat relevan jika program pengembangan desa digital ini dilaksanakan.

Berdasarkan data awal yang dikumpulkan dari PKBM Bina Bangsa Kabupaten Bangka Barat melalui observasi awal diketahui bahwa jumlah keseluruhan warga belajar di instansi ini berjumlah 189 warga belajar yang berasal dari berbagai desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Tentunya hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi peneliti untuk pengembangan Desa Digital dan Masyarakat Melek Teknologi. Kemudian jika dilihat dari usia warga belajar masyarakat di PKBM Bina Bangsa yaitu warga belajar masyarakat dengan usia 6-12 tahun berjumlah 8 orang, usia 13-15 tahun berjumlah 61 tahun, usia 16-20 tahun berjumlah 56 orang dan usia di atas 20 tahun berjumlah 64 orang. Hal ini tentunya menjadi peluang yang sangat tepat sasaran sebab dilihat dari umur warga belajar rata-rata masuk pada usia produktif dalam pengelolaan digitalisasi. Sehingga dengan hadirnya program pengembangan desa digital ini diharapkan mampu menjadi pemenuhan ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi warga belajar masyarakat PKBM Bina Bangsa.

Pelaksanaan kinerja pemerintahan desa tentunya dipengaruhi oleh rencana dan persiapan pemerintahan desa masing-masing. Dalam mendesain sistem pengelolaan desanya, pemerintah desa tentunya diharapkan dapat menciptakan kualitas dan kuantitas pembangunan yang baik, efisien, terbuka, dan kredibel dalam pengelolaannya serta adanya keikutsertaan langsung dari masyarakat di wilayah desa tersebut. Masalah yang ada pada

pemerintah Desa Tebing yaitu masih belum maksimalnya pelayanan di lokasi mereka bekerja. Perangkat desa terkadang dalam hal kehadiran masih belum disiplin atau terindikasi membolos saat proses pelayanan di desa sedang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, dari sisi administratif perangkat Desa Tebing masih terindikasi tidak rapi sehingga mempersulit dalam hal pendataan pelaporan di desa tersebut. Diharapkan dengan adanya program desa digital ini dapat meminimalisir permasalahan yang muncul ini melalui berbagai inovasi dan kreasi digital dalam peningkatan kinerjanya.

Ada beberapa kelemahan perangkat desa dan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam melaksanakan fungsinya yaitu (1) masih minimnya SDM perangkat desa dan warga belajar masyarakat; (2) jaringan sarana dan prasarana yang mendukung kerja perangkat desa dan warga belajar masyarakat masih belum maksimal; (3) hasil gaji dan pemasukan kesejahteraan perangkat desa masih belum layak untuk mendukung kebutuhan keluarganya; dan (4) posisi perangkat desa dalam melaksanakan fungsinya masih belum kuat secara kebijakan dan landasan lainnya yang mendukung hal tersebut.²

Perlu adanya suatu solusi salah satunya dengan adanya suatu naungan. Kongres Kebudayaan Desa merupakan rangkaian upaya desa untuk menyumbangkan ide, gagasan, dan pemikirannya untuk Indonesia. Desa yang hadirnya jauh mendahului negara telah berabad-abad memiliki mekanisme pertahanan kebudayaan yang kokoh atas krisis multidimensional mulai zaman kolonial hingga kemerdekaan. Desa³. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dipilih menuntut pengalaman belajar dari adanya organisasi yang dibentuk oleh PKBM Bina Bangsa dan pemerintah desa Tebing Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan kecenderungan yang diinginkan serta keperluan dari masyarakat secara menyeluruh. Semua kegiatan sangat bermakna bagi masyarakat setempat sehingga organisasi tersebut relatif akan bertahan lebih lama. Menumbuhkan masyarakat yang memiliki pengetahuan lebih dalam pembangunan kemasyarakatan, menampilkan rasa kepedulian terhadap desanya, dan sebagai generasi muda yang tergabung dalam organisasi di masyarakat desa Tebing Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat

² Ombi Romli and Elly Nurlia, 'Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)', *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3.1 (2017), 36–54 <<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12635>>.

³ Ryan Sugiarto dkk, *Kongres Kebudayaan Desa (Sanggar Inovasi Desa, 2022)*.

tentunya akan memiliki kebanggaan tersendiri bagi masyarakat tersebut, khususnya pada program pengembangan desa digital tersebut.

Pembangunan desa dapat berlangsung secara efektif dan efisien bahwa perlu adanya suatu perencanaan partisipatif yang dapat dijadikan pedoman atau arah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini tentunya dapat didasarkan pada hak-hak masyarakat dimana harus terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut.⁴ Pembangunan desa ini salah satunya pembangunan di bidang teknologi informasi, sehingga melalui pembangunan desa digital dapat menjawab tantangan kedepannya khususnya bagi pemerintah desa dan pusat kegiatan belajar masyarakat.

Pelaksanaannya selain melalui lembaga informal seperti partisipasi LSM, kelompok kepentingan lain melalui tuntutan dari pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan negara, juga dilaksanakan melalui lembaga formal daerah dan di tingkat desa.⁵ Mengenai dampak keberhasilan suatu pemerintahan desa bahwa keberhasilan dan kegagalan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kepala desa dan seberapa jauh kepala desa merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, untuk mempengaruhi masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan desa.⁶

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa khususnya di Desa Labuan, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan tidak dapat secara maksimal menjalankan misinya, karena SDM anggota perangkat desa khususnya di bidang pendidikan masih rendah, sehingga perangkat desa belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan memahami apa yang perlu dilakukan sehubungan dengan fungsi pengawasan dan pengendalian yang diperlukan. Seharusnya kewenangan mereka untuk memantau dan mengontrol kegiatan BPD/Kepala Desa, anggaran operasional perangkat desa sangat kecil dan sarana dan prasarana perangkat desa sangat tidak memadai.⁷

⁴ Balilatfo- KDPDTT, *Musyawah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa* (Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2019).

⁵ Susiati Susiati, Risman Iye, and L. O. A. Suherman, 'Hot Potatoes Multimedia Applications in Evaluation of Indonesian Learning In SMP Students in Buru District', *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 2.4 (2019), 556–70 <<https://doi.org/10.34050/els-jish.v2i4.8455>>.

⁶ Riant Nugroho Pd Firre An Suprpto, SAP, M., *Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 2: Kepemimpinan dan Demokrasi Desa* (Elex Media Komputindo, 2021).

⁷ Sofyan Malik, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa', *Jurnal Ius Constituendum*, 5.2 (2020), 325–43 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>>.

Berdasarkan konsep awal program pengembangan desa digital di atas serta permasalahan yang muncul dan peluang pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan peneliti dan berbagai *stakeholder* terkait bahwa program ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan desa digital, dengan cara meningkatkan literasi digital dan memberikan pelatihan pengelolaan teknologi informasi bagi pemerintah desa dan masyarakat yang masuk sebagai warga belajar masyarakat.⁸

Analisis pengembangan desa digital ini dilaksanakan di dua tempat yaitu Desa Tebing khususnya seluruh perangkat desa di pemerintahan desa tersebut dan PKBM Bina Bangsa khususnya bagi warga belajar binaan di instansi tersebut. Diharapkan program desa digital ini dapat menjadi solusi atas tantangan era digital saat ini bagi pemerintahan Desa Tebing dan warga belajar di PKBM Bina Bangsa Kabupaten Bangka Barat. Oleh karena itu, Program ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan desa digital, dengan cara meningkatkan literasi digital dan memberikan pelatihan pengelolaan teknologi informasi bagi pemerintah desa dan masyarakat yang masuk sebagai warga belajar PKBM Bina Bangsa Kabupaten Bangka Barat.

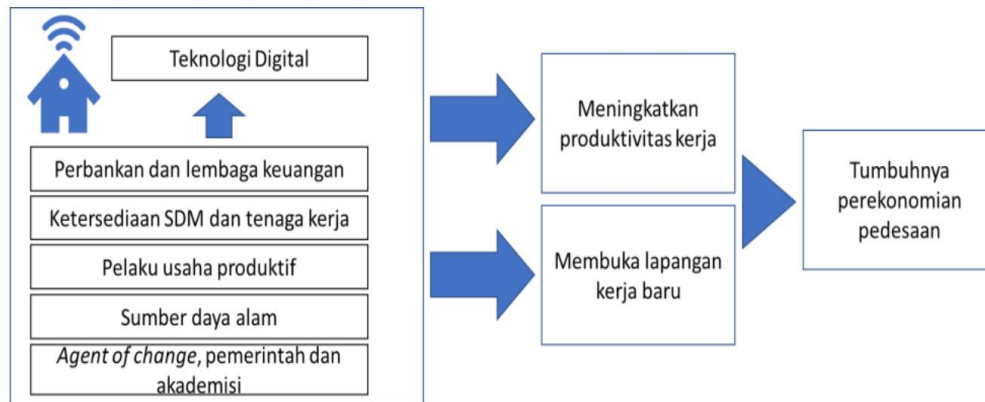
B. Tinjauan Pustaka

1. Desain Pengembangan Desa Digital

Desain ataupun model dari desa digital di Indonesia tentunya berbeda-beda antara satu desa dengan desa lainnya. Hal tersebut dikarenakan antara satu desa dengan desa lainnya memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang berbeda pula. Namun demikian secara umum model pengembangan digital pedesaan atau desa digital yang akan kami lakukan dapat dilihat dalam dalam gambar berikut:

⁸ Feri Sulianta, *Literasi Digital, Riset dan Perkembangannya dalam Perspektif Social Studies* (Feri Sulianta, 2020).

Gambar 1. Model Digitalisasi Pedesaan



Merujuk pada gambar 1 di atas, maka model dari desa digital dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Elemen-elemen yang terdiri dari sumber daya alam, pelaku usaha produktif, SDM, tenaga kerja dan lembaga keuangan serta perbankan harus terhubung dan mampu untuk memberdayakan teknologi digital;
2. Untuk meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi digital dari seluruh elemen-elemen tersebut, maka diperlukan kolaborasi dari *agent of change* ataupun praktisi, pemerintah setempat dan akademisi untuk mensosialisasikan bagaimana menggunakan teknologi digital yang tepat guna;
3. Hasil dari penggunaan teknologi digital yang tepat guna, maka akan meningkatkan kemampuan pemasaran, meningkatkan reputasi usaha, meningkatkan produktivitas usaha, mampu mengakses permodalan dengan baik sehingga berdampak terhadap baiknya kinerja pelaku usaha produktif (pengusaha mikro dan kecil) yang terdapat pada desa tersebut;
4. Baiknya kinerja dari pelaku usaha produktif di desa tersebut, membuka peluang ekspansi usaha dan juga volume produksi sehingga berdampak terhadap pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat di desa tersebut;
5. Iklim usaha yang kolaboratif dan sinergis diantara para pelaku usaha dan masyarakat yang terhubung dengan teknologi digital akan berkontribusi terhadap pendapatan desa sehingga kesejahteraan masyarakat di desa tersebut juga meningkat.

2. Literasi Digital

Literasi digital atau kemelekan digital merupakan pengetahuan dan kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya dalam menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan informasi, membuat informasi dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat dan tentunya patuh hukum dan aturan.⁹ Prinsip dasar dari sebuah pengembangan literasi digital, menurut UNESCO merupakan konsep literasi digital yang menaungi dan menjadi landasan penting terhadap kemampuan memahami perangkat-perangkat teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Misalnya dalam literasi TIK yang merujuk pada kemampuan teknis yang memungkinkan keterlibatan aktif dari komponen lapisan masyarakat sejalan dengan perkembangan budaya serta pelayanan publik yang berbasis digital.

Literasi TIK dijelaskan dengan dua sudut pandang yang berbeda dimana, pertama literasi teknologi yang sebelumnya dikenal dengan sebutan *computer literacy* yang merujuk pada pemahaman tentang teknologi digital termasuk di dalamnya pengguna dan kemampuan teknis. Kedua, dengan menggunakan literasi informasi ini memfokuskan pada satu aspek pengetahuan, seperti kemampuan untuk memetakan, mengidentifikasi, mengelola dan menggunakan informasi digital secara optimal dan maksimal.¹⁰ Konsep ini sejalan dengan terminologi yang dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2011, yaitu merujuk pada kehidupan yang tidak bisa lepas dari kegiatan literasi seperti membaca dan menulis yang tentunya berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu literasi digital suatu kemampuan yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi, melainkan juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran dan kemampuan bersikap, berfikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital sekarang yang sedang mendunia.¹¹

Pentingnya literasi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemahaman melek digital, maka kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu serta meningkatkan kemampuan

⁹ Suherdi, Devri. 2021. *Peran Literasi Digital Dimasa Pandemi*. Deli: Cattleya Darmaya Fortuna.

¹⁰ Law, Nancy & Woo, David. 2018. *A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2*. Canada: UNESCO Institute for Statistics

¹¹ Bawden, D. 2008. Information and Digital Literacy: A review of concept. *Journal of Dekementation*, 57 (2) 218-259 Tibor Koltay, *The Media and the Literacy, Information Literacy and Digital Literacy*.

individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Selain juga dapat menambah penguasaan kosa kata individu, dari berbagai informasi yang dibaca, literasi digital dapat juga meningkatkan kemampuan verbal individu. Oleh karena itu, literasi digital harus dikuasai dan dipahami terlebih dahulu sebelum berselancar menggunakan teknologi digital.¹²

3. Desa Digital

Desa digital merupakan salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa. Konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian.¹³ Dengan adanya desa digital diharapkan pelayanan publik dapat meningkat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi berkembang. Desa digital merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan publik. Dalam desa digital, pelayanan publik akan bersifat digital dengan terkoneksi melalui jaringan nirkabel. Pelayanan yang bersifat digital akan mendorong peningkatan layanan publik di desa-desa dan mempermudah perangkat desa untuk melakukan evaluasi dan perbaikan layanan dengan basis data yang nantinya dimiliki. Selain itu, desa digital juga akan memperlancar penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sehingga pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa dapat lebih transparan dan akuntabel.

Digitalisasi pedesaan adalah suatu proses untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan melalui TIK yang berbasiskan digital. Sedangkan tujuan dari digitalisasi pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari aspek ekonomi, aspek kesehatan dan aspek pendidikan. Digitalisasi pedesaan merupakan implementasi dari digital sosial inovasi. Digital sosial inovasi adalah jenis inovasi sosial dan kolaborasi dari masyarakat pedesaan yang menggunakan teknologi digital untuk bersama-

¹² Wahyuni, Sri. Dkk. 2022. *Literasi Digital Berbasis Pendidikan*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

¹³ Subiakto, H. (2013) 'Internet untuk pedesaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat', *Masyarakat, kebudayaan dan Politik*, 26(4), pp. 243–256.

sama menciptakan produk atau layanan yang berbasis pengetahuan sebagai solusi dari kebutuhan masyarakat di pedesaan.¹⁴ Dengan demikian, digitalisasi pedesaan dapat dikatakan sebagai upaya dari masyarakat desa untuk memberdayakan potensi-potensi yang ada di pedesaan baik sumber daya alam, sumber daya manusia, faktor produksi, pengetahuan melalui teknologi digital untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang terdapat di pedesaan. Namun, internet saja tidak serta merta dapat mewujudkan desa digital karena ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Berikut lima hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan menuju desa digital.¹⁵

1. Lakukan Sosialisasi

Penting sekali untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bergerak bersama mewujudkan desa digital. Menyadari pentingnya dan mudahnya internet dalam membantu aktivitas mereka tentu akan mendorong keinginan menuju desa yang cakap terhadap teknologi.

2. Perhatikan Tujuan dan Kepentingannya

Kehadiran desa digital dapat bermanfaat untuk menghilangkan kesenjangan teknologi di desa. Program ini berdasar pada UU Desa dan Permendagri sehingga sangat dianjurkan bagi para pemerintah daerah setempat untuk mewujudkannya. Berbagai layanan akan tersedia dalam satu *platform* tidak terkecuali sebagai media promosi usaha yang dimiliki masyarakat desa sehingga mampu menjangkau pasar lebih luas. Hal ini tentu akan memengaruhi citra positif terhadap desa itu sendiri.

3. Membangun Infrastruktur

Demi mewujudkan desa digital yang optimal, pemerintah setempat dapat memulainya dengan melakukan pembangunan terhadap infrastruktur. Hal ini merupakan langkah awal yang sangat penting seperti dengan menyediakan jaringan internet. Meskipun tidak dapat dipungkiri dalam prosesnya akan menghadapi berbagai kendala karena tidak semua wilayah mampu menjangkau jaringan internet dengan baik.

4. Membangun Teknologi Desa

¹⁴ Zerrer, N. and Sept, A. (2020) 'Smart villagers as actors of digital social innovation in rural areas', *Urban Planning*, 5(4), pp. 78-88. doi: 10.17645/up.v5i4.3183.

¹⁵ <https://berita.upi.edu/mengenal-desa-digital-ini-yang-harus-disiapkan/> akses, 8 Mei 2023

Dalam proses pembangunan teknologi desa seperti membuat aplikasi ataupun *website* desa resmi, hal tersebut dapat dilakukan secara paralel tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur rampung karena pengembangannya dapat dilakukan terlebih dahulu. Aplikasi atau *website* desa akan menjadi *platform* tata kelola desa yang menawarkan sejumlah layanan seperti sistem informasi pembangunan desa, administrasi, kependudukan, pelayanan publik, anggaran, dan berbagai layanan lainnya. Tidak hanya itu, pastikan fitur yang tersedia mudah diakses sehingga tidak menyulitkan masyarakat desa dalam menggunakan dan mengakses platform tersebut.

5. Menyediakan Perangkat Pintar

Selain dari bidang teknologi yang dibangun, penting juga dalam memperhatikan perangkat pintar yang akan digunakan sebagai pendukung demi terwujudnya desa digital. Pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan mampu diimplementasikan oleh mereka. Jika perlu, adakan sosialisasi secara rutin hingga masyarakat menjadi terbiasa dalam menggunakannya. Perlu diingat bahwa membangun desa digital harus terus berkesinambungan dan kerjasama antara aparatur desa dengan masyarakat desa sangat penting sehingga desa digital yang telah dibangun mampu diimplementasikan, dirasakan, dan dimiliki bersama-sama.

C. Metodologi

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini meliputi konsolidasi tim, persiapan teknis pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), persiapan survei, persiapan PP (*Participatory Planning*) dan persiapan pada mitra terkait.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data secara garis besar meliputi survei kebutuhan masyarakat baik secara sekunder maupun wawancara kepada masyarakat, penggalian sistem tata kelola administrasi pemerintahan di desa serta kebutuhan aplikasi yang diinginkan oleh masyarakat (*user requirment*).

3. Tahap Analisis

Tahap analisis meliputi pengimplementasian sistem tata kelola administrasi pada desa serta kebutuhan lain yang diinginkan oleh masyarakat.

Pendekatan Pengabdian Masyarakat

Pendekatan pendampingan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah PAR (*Participatory Action Research*) yaitu sebuah metode yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam komunitas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif. Dalam PAR ini, pengabdian bersama masyarakat akan saling berkerjasama untuk menemukan masalah dan mencari solusi untuk mendampingi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait TIK.

PAR sendiri mempunyai beberapa karakteristik Pertama, PAR merupakan penelitian atau pengabdian yang ditandai dengan keterlibatan aktif masyarakat sebagai kelompok sasaran. Masyarakat ditempatkan sebagai subjek dan bukan objek. Dengan demikian, masyarakat berperan aktif dalam kegiatan. Kedua, dalam PAR, peneliti menempatkan diri sebagai *insider* dan bukan *outsider*. Peneliti harus berada di dalam dan bersama-sama masyarakat membangun apa yang menjadi tujuannya. Ketiga, PAR adalah gabungan dari penelitian dan tindakan langsung yang dilakukan secara partisipatif guna meningkatkan kehidupan masyarakat, yang dalam konteks pengabdian ini adalah moderatisme dalam berbangsa dan beragama. Keempat, PAR bertujuan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam kegiatan yang dicanangkan, sehingga tujuan yang diinginkan bisa terwujud.¹⁶

Adapun langkah-langkah dalam setiap tahap kerja PAR yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap *to Know* (Mengetahui Kondisi Riil Komunitas)

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah proses-proses inkulturasi yaitu membaaur dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan. Membaur bukan sekedar berkumpul dengan mereka, tetapi membaaur untuk menyepakati proses bersama dengan membentuk kelompok. Proses bersama melalui kelompok tersebut melakukan belajar untuk menemukan masalah sosial mereka melalui riset. Adapun tahap awal ini, karena masih melakukan proses mengetahui keadaan, belum melakukan analisis masalah sosialnya, maka yang dilakukan adalah mencari gambaran keadaan apa adanya secara detail, menyeluruh, dan mendalam.

¹⁶ Rahmat dan Mirnawati hlm. 27

2. Tahap *to Understand* (Memahami Problem Komunitas)

Tahap *to understand* pada ke dua ini bertujuan untuk memahami persoalan utama komunitas. Maka langkah-langkah yang ditempuh untuk analisis bersama masyarakat adalah melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD). Tahap ini disebut juga dengan tahap dekodifikasi, yaitu tahap mensistematiskan problem-problem sosial yang terjadi. Proses FGD tetap menggunakan *tool* (alat) untuk mempermudah teknis analisis, sekaligus membelajarkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan teknik sekaligus penggunaan media untuk pendidikan masyarakat (populer) dalam rangka proses pendidikan kritis menjadi sangat penting.

3. Tahap *to Plan* (Merencanakan Pemecahan Masalah Komunitas)

Tahap *to plan* adalah tahap yang dilakukan untuk merencanakan aksi pemecahan masalah. Tahap ini sangat ditentukan oleh proses sebelumnya dalam merumuskan masalah, sebab pemecahan masalah harus didasarkan atas rumusan masalah yang terjadi. Bukan masalah yang sekedar disodorkan oleh masyarakat untuk diselesaikan oleh tim peneliti.

4. Tahap *to Act* (Melakukan Program Aksi Pemecahan Masalah)

Tahap ini merupakan tahap implementasi program dari yang direncanakan pada tahap sebelumnya. Program aksi harus merupakan pemecahan problem sosial yang sudah dianalisis sejak tahap awal, oleh karena itu antara masalah dan pemecahan masalah harus linier. Program bisa merupakan hal-hal praktis, namun tetap harus sesuai dengan hasil analisis problem sosialnya dan perencanaan strategis yang disusunnya. Serta dengan memperhatikan potensi sumberdaya yang dimiliki, sehingga pelaksanaan program tidak memberatkan komunitas, tetapi justru menciptakan kondisi yang terbangun dalam kesatuan yang saling gotong royong sebagai tradisi yang sudah dimiliki oleh masyarakat selama ini.

5. Tahap *to Change* (Membangun Kesadaran untuk perubahan dan keberlanjutan)

Pada tahap ini, hal yang semestinya dilakukan adalah melakukan refleksi atas hasil proses selama proses riset dan pemberdayaan. Refleksi bukan sekedar dilakukan untuk internal tim peneliti, tetapi dilakukan bersama komunitas, sehingga terbangun pembelajaran untuk keseluruhan masyarakat yang terlibat. Refleksi dibangun untuk mengkritisi kembali hal-hal yang pernah dilakukan dan pelajaran apa yang bisa diambil

untuk menapak ke depan. Dengan demikian dibangunlah komitmen untuk melanjutkan program.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Tahap *to Know* (Mengetahui Kondisi Komunitas)

Program digitalisasi berbasis Masyarakat di Desa Tebing, Desa Tuik dan PKBM Bina Bangsa ini diawal dilakukan identifikasi ke pemerintahan desa dan lembaga melalui analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini berupa wawancara awal dengan Kepala Desa Tebing, Kepala Desa Tuik dan Ketua Lembaga PKBM Bina Bangsa Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan wawancara awal kepada Kepala Desa Tebing Bapak Saimi, S.I.P terkait urgensi perlunya dilakukan kegiatan pelatihan digital bagi perangkat desa mengungkapkan bahwa:

“Sumber Daya Manusia khususnya perangkat desa Tebing hanya beberapa perangkat saja yang benar-benar memahami dalam pengoperasian komputer, walaupun sudah mengenal perangkat komputer seperti apa, tetapi membutuhkan peningkatan pengetahuan melalui pelatihan digitalisasi”.¹⁷

Selain itu, menurut Kepala Desa Tuik Bapak Sudrajat, S.I.P terkait urgensi kegiatan pelatihan digital bagi perangkatnya menyatakan:

“Di Desa Tuik mengapresiasi jika ada pelatihan digital bagi seluruh perangkatnya sehingga hasil dari pelatihan ini akan menambah pengetahuan digital dan diharapkan dapat membantu pemerintah desa jika dibutuhkan mengenai perangkat digital komputer khususnya”.¹⁸

Wawancara dengan Ketua PKBM Bina Bangsa Kabupaten Bangka Barat Bapak H. Pasti, S.Pd terkait pentingnya pelatihan digital bagi warga belajar di Lembaga tersebut mengungkapkan bahwa:

“Pelatihan digital adalah program yang sangat membantu warga belajar Lembaga PKBM Bina Bangsa, apalagi terkait program belajar jarak jauh atau online sudah mulai diterapkan di Lembaga ini sehingga jika ini dapat dilakukan bagi warga belajar kami sangat berterima kasih dan diharapkan dapat berjalan berkelanjutan”.¹⁹

¹⁷ Wawancara Kepala Desa Tebing Bapak Saimi, S.I.P

¹⁸ Wawancara Kepala Desa Tuik Bapak Sudrajat, S.I.P

¹⁹ Wawancara Ketua PKBM Bina Bangsa Kab. Bangka Barat Bapak H. Pasti, S.Pd

Melalui wawancara tersebut maka secara umum pelaksanaan kegiatan digitalisasi bagi Pemerintahan Desa Tebing, Pemerintahan Desa Tuik dan Lembaga PKBM Bina Bangsa Kabupaten Bangka Barat perlu dilakukan sehingga diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam pengetahuan digital khususnya perangkat komputer.

Implementasi penerapan IT di Pemerintahan Desa adalah dengan mengupayakan tersedianya jaringan komputer, sumber daya manusia yang mumpuni dan tersedianya sarana serta prasarana yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal. Selain itu, dengan menggunakan sistem IT data-data masyarakat yang ada dapat tersimpan dengan aman dan rapih. Kemudahan yang didapatpun dapat mengefektifkan kinerja para aparat desa.²⁰

Tahap awal ini juga dilakukan untuk mengetahui kondisi awal sehingga dalam pelaksanaannya dapat secara mendalam penerapannya maka dibutuhkan data profil lokasi pelaksanaan program digitalisasi. Untuk lebih lanjut terkait hal tersebut dapat berupa profil kelembagaan. Profil Desa Tebing, Desa Tuik dan PKBM Bina Bangsa Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat di lampiran 1 laporan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. Pelaksanaan Kegiatan Tahap *to Understand* (Memahami Masalah Komunitas)

Pelaksanaan tahap berikutnya yaitu mengetahui *problem* sasaran program pelatihan digitalisasi di Desa Tebing, Desa Tuik dan PKBM Bina Bangsa Kabupaten Bangka Barat. Untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan maka dilakukan uji *pretest* bagi peserta pelatihan digitalisasi bagi perangkat desa di Pemerintahan Desa Tebing, Pemerintahan Desa Tuik dan PKBM Bina Bangsa.

Berdasarkan uji *pretest* terkait kebutuhan materi pelatihan digital dibutuhkan pelatihan pengoperasian Microsoft bagi perangkat desa dan warga belajar di instansi tersebut. Pelatihan pengoperasian Microsoft ini berupa pengoperasian Microsoft Power Point, Word dan Excel.

Melalui wawancara bagi pemerintah Desa Tebing dan Desa Tuik dibutuhkan adanya pelatihan Microsoft Power Point saja sebab hal ini sangat dibutuhkan Ketika Kepala Desa dalam atau perangkat desa dapat mengkomunikasikan laporan kegiatan-kegiatan desa ke

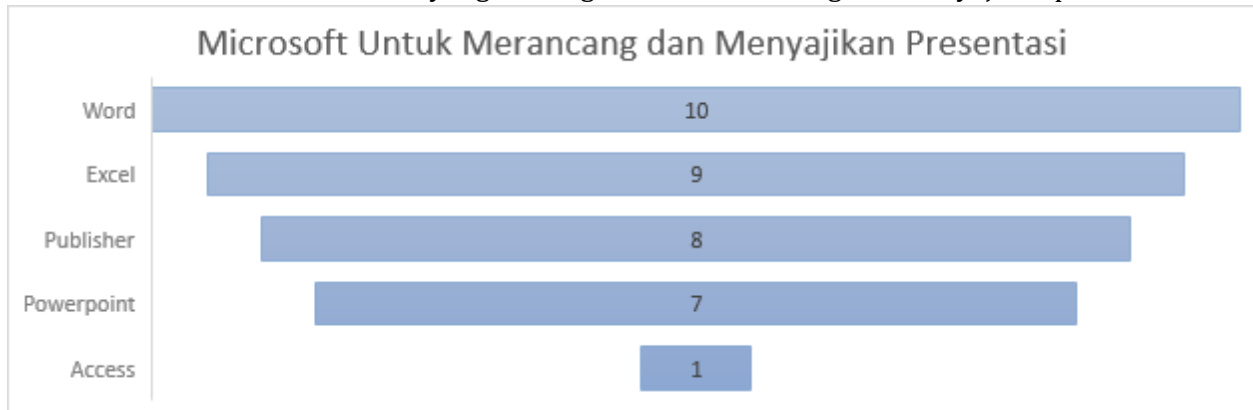
²⁰ Mukhsin Mukhsin, 'Peranan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa Di Era Globalisasi', *TEKNOKOM*, 3.1 (2020), 7-15 <<https://doi.org/10.31943/teknokom.v3i1.43>>.

khalayak umum atau stakeholder lainnya. Untuk pengoperasian Microsoft Word dan Excel perlu juga disampaikan secara komprehensif secara daring sehingga keberlanjutan program dapat dilaksanakan secara maksimal bagi pengembangan sumber daya manusia perangkat desa khususnya dalam hal digitalisasi kekinian.²¹

Kebutuhan dari warga PKBM Bina Bangsa terkait pelatihan digitalisasi ini menginginkan adanya pelatihan Microsoft secara keseluruhan baik secara tatap muka langsung dan daring sehingga semua peserta yang mengikuti program pelatihan tersebut dapat maksimal.²²

Berdasarkan *pretest* mengenai pengetahuan peserta terkait aplikasi Microsoft yang berfungsi untuk merancang dan menyajikan presentasi bahwa dari 35 peserta secara keseluruhan baik itu peserta perangkat desa Tebing, perangkat desa Tuik dan warga belajar PKBM Bina Bangsa masih banyak yang belum tepat dalam menjawab soal *pretest* tersebut. Untuk lebih lanjut dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar 2. *Pretest* Microsoft yang berfungsi untuk merancang dan menyajikan presentasi

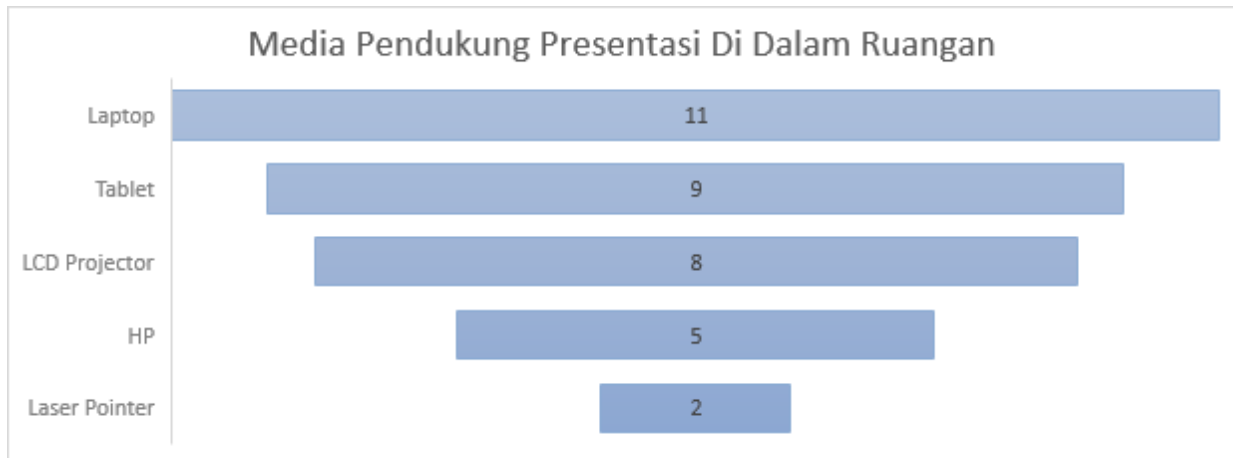


Selanjutnya, hasil *pretest* mengenai media pendukung presentasi di dalam ruangan untuk presentasi bahwa paling tinggi memilih HP sebagai media pendukung presentasi. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

²¹ Wawancara dengan Kepala Desa Tebing dan Kepala Desa Tuik Kabupaten Bangka Barat

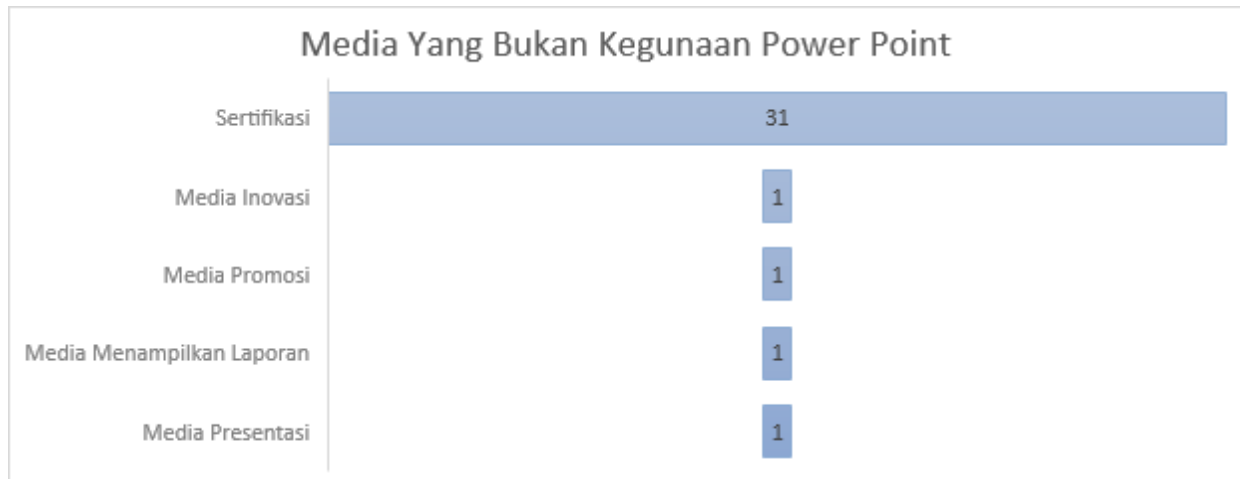
²² Wawancara dengan Ketua PKBM Bina Bangsa

Gambar 3. Pretest Media Pendukung Presentasi di dalam Ruangan



Hasil pretest mengenai media yang bukan bagian dari kegunaan power point bahwa peserta banyak memilih media sertifikasi. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4. Pretest Mengenai Media yang Bukan Bagian dari Kegunaan Power Point



Selain itu, terkait hasil *pretest* yang dilakukan kepada peserta program digitalisasi berbasis Masyarakat di Desa Tebing, Desa Tuik dan Warga Belajar PKBM Bina Bangsa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
 Deskripsi Hasil Pretest Pelaksanaan Program Digitalisasi Desa Tebing, Desa Tuik dan Warga Belajar
 PKBM Bina Bangsa

No	Pretest	Deskripsi Pencapaian	Analisis Temuan Pretest
1	Format file dokumen Microsoft PowerPoint pada umumnya ber-extension	15 peserta menjawab doc, 10 peserta menjawab ppt, 5 peserta menjawab xls, 3 peserta menjawab mdb dan 2 peserta menjawab rtf.	Berdasarkan hal tersebut bahwa masih rendah pemahaman peserta mengenai extension powerpoint. Seharusnya yang menjawab extension ppt lebih tinggi dari pilihan jawaban lainnya.
2	Langkah pertama membuat file baru presentasi	16 peserta menjawab open file, 9 peserta menjawab klik new file, 6 peserta menjawab klik print preview, 2 peserta menjawab klik page set up file dan 2 peserta menjawab klik save as.	Berdasarkan hal tersebut bahwa masih rendah pemahaman peserta mengenai Langkah awal membuat file baru presentasi. Seharusnya yang menjawab klik new file lebih tinggi dari pilihan jawaban lainnya.
3	Membuka file pada Microsoft yang sudah ada dapat membuka ikon	14 peserta menjawab save, 8 peserta menjawab new, 7 peserta menjawab open, 3 peserta menjawab close dan 3 peserta menjawab print.	Berdasarkan hal tersebut bahwa masih rendah pemahaman peserta mengenai membuka file pada Microsoft yang sudah ada. Seharusnya yang menjawab open file lebih tinggi dari pilihan jawaban lainnya.
4	Presentasi visual biasanya menggunakan media	15 peserta menjawab video, 10 peserta menjawab gambar, dan 10 peserta menjawab teks.	Berdasarkan hal tersebut bahwa pemahaman peserta mengenai presentasi visual sudah baik, namun hanya perlu penguatan sehingga lebih mahir dalam pengoperasian perangkat komputer.

Berdasarkan hasil *pretest* program digitalisasi berbasis Masyarakat di Desa Tebing, Desa Tuik dan Warga Belajar PKBM Bina Bangsa, bahwa perlu dilakukan kegiatan terjadwal sehingga dapat diberikan pelatihan secara tatap muka. Namun, diperlukan juga pelaksanaan secara daring sehingga kegiatan ini terus berkelanjutan melalui website classroom.google.com.

3. Tahap *to Plan* (Merencanakan Pemecahan Masalah Komunitas)

Berdasarkan hasil *pretest* yang telah dilakukan sebelumnya diperoleh perlunya kegiatan terjadwal berupa pelatihan secara tatap muka. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh tim dalam kegiatan pembinaan ini adalah pelatihan yang dilakukan di Desa Tebing dengan

mengundang narasumber dan *stakeholder* terkait. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka kepada seluruh peserta di Kantor Desa Tebing. Peserta yang hadir adalah seluruh perangkat desa. Berdasarkan temuan awal diperoleh perlunya pelaksanaan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan kantor berupa Ms.Powerpoint dan yang terintegrasi dengan aplikasi sawira.

Kegiatan kedua, tim pengabdian melakukan kegiatan di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dengan mengundang narasumber dan *stakeholder* terkait. Kegiatan ini berupa pelatihan *public speaking*, teknik presentasi dan Pelatihan Ms.Office khususnya Ms.Word dan Ms. Powerpoint.

Kegiatan ketiga berupa kegiatan yang dilakukan bersama warga belajar PKBM Bina Bangsa. Kegiatan ini juga mengundang dua narasumber yang berasal dari lembaga pelatihan kerja (LPK) setempat. Materi yang disampaikan berupa materi MS.Office secara umum yakni Ms. Word, Ms. Excel, dan Ms. Powerpoint.

Berdasarkan ketiga kegiatan di atas, para tim pengabdian baik itu Ketua beserta anggota dan mahasiswa juga memfasilitasi serta mensosialisasikan pentingnya pelatihan Digitalisasi berbasis masyarakat di Desa Tebing, Desa Tuik, dan Warga Belajar PKBM Bina Bangsa Kabupaten Bangka Barat.

Sebagai upaya keberlanjutan kegiatan tatap muka yang telah dilakukan di ketiga lembaga tersebut. Tim Pengabdian kepada Masyarakat juga menyiapkan sistem pembelajaran secara daring melalui *google classroom*. Upaya terakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian peningkatan pengetahuan tentang pengoperasian perangkat komputer khususnya dan digitalisasi bagi masyarakat di Desa Tebing, Desa Tuik dan Warga Belajar PKBM Bina Bangsa yaitu melalui uji *posttest*.

4. Tahap *to Act* (Melakukan Program Aksi Pemecahan Masalah)

Pelaksanaan kegiatan pada pertemuan pertama secara tatap muka dihadiri oleh perangkat kantor desa dan masyarakat desa yang termasuk ke dalam sasaran Digitalisasi. Materi yang dibahas pada pertemuan pertama ini berupa pengenalan mengenai digitalisasi secara umum. Hal ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan awal tentang pentingnya kolaborasi antara pihak Perguruan Tinggi (PT) untuk turut andil membantu pemerintahan desa dalam upaya penguatan Digitalisasi di Desa Tebing, Desa Tuik dan Warga Belajar PKBM Bina Bangsa.

5. Tahap *to Change* (Membangun Kesadaran dan Keberlanjutan)

Pada tahap ini akan ditunjukkan hasil post-test yang telah dilakukan untuk mengetahui sejauhmana peningkatan kemampuan peserta yang telah mengikuti pelatihan tersebut. Selanjutnya, tim pengabdian juga memaparkan hasil dokumentasi kegiatan pengabdian yang dipublikasikan di media *online*.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan terkait digitalisasi berbasis masyarakat di Desa Tebing, Desa Tuik dan warga belajar PKBM Bina Bangsa Kabupaten Bangka Barat menyimpulkan bahwa 1) upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman digitalisasi berbasis masyarakat yaitu dengan cara melakukan pelatihan secara luring dan daring berupa pengenalan dan praktik secara langsung mengenai *Ms. Office* untuk menunjang tatakelola pemerintahan desa dan peningkatan pengetahuan digital bagi para warga belajar di masyarakat tersebut. Namun sebelum itu, dilakukan upaya identifikasi permasalahan sehingga ditemukan satu program yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi digital peserta. Upaya yang dilakukan juga melalui pelaksanaan pelatihan secara daring dengan tujuan untuk keberlanjutan program digitalisasi di Desa Tebing, Desa Tuik dan Warga Belajar PKBM Bina Bangsa melalui bantuan aplikasi pembelajaran jarak jauh; 2) Dampak dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini melalui kegiatan pelatihan digitalisasi berbasis masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan serta kompetensi pengoperasian perangkat komputer khususnya dan pengetahuan digital pada umumnya. Dibuktikan dengan hasil uji *posttest* yang menunjukkan persentase yang baik setelah dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawden, D. 2008. Information and Digital Literacy: A review of concept. *Journal of Dekementation*, 57 (2) 218-259 Tibor Koltay, *The Media and the Literacy, Information Literacy and Digital Literacy*.
- Husna, Aftina Nurul, Aning Az Zahra, Moch Imron Rosyidi, Laili Qomariyah, Yulia Kurniaty, Muhammad Eka Purbaya, and others, *Memberdayakan Masyarakat Digital* (Unimma Press, 2021)

- KDPDTT, Balilatfo-, *Musyawarah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa* (Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2019)
- Law, Nancy & Woo, David. 2018. *A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2*. Canada: UNESCO Institute for Statistics
- Malik, Sofyan, 'Peran Badan Per Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa', *Jurnal Ius Constituendum*, 5.2 (2020), 325–43 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>>
- Pd, Riant Nugroho, Firre An Suprpto, SAP, M., *Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 2: Kepemimpinan dan Demokrasi Desa* (Elex Media Komputindo, 2021)
- Rahmat, Abdul, and Mira Mirnawati. "Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no. 1 (2020): 62. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>.
- Rauf, Rahyunir, and Yusri Munaf, *Lembaga kemasyarakatan di Indonesia* (Zanafa Publishing, 2015)
- Romli, Ombi, and Elly Nurlia, 'Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)', *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3.1 (2017), 36–54 <<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12635>>
- Roza, Darmini, and Laurensius Arliman S, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (JOURNAL OF LAW)*, 4.3 (2017), 606–24
- Ryan Sugiarto, dkk, *Kongres Kebudayaan Desa* (Sanggar Inovasi Desa, 2022)
- Sulianta, Feri, *Literasi Digital, Riset dan Perkembangannya dalam Perspektif Social Studies* (Feri Sulianta, 2020)
- Subiakto, H. (2013) 'Internet untuk pedesaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat', *Masyarakat, kebudayaan dan Politik*, 26(4), pp. 243–256.
- Suherdi, Devri. 2021. *Peran Literasi Digital Dimasa Pandemi*. Deli: Cattleya Darmaya Fortuna
- Susiati, Susiati, Risman Iye, and L. O. A. Suherman, 'Hot Potatoes Multimedia Applications in Evaluation of Indonesian Learning In SMP Students in Buru District', *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 2.4 (2019), 556–70 <<https://doi.org/10.34050/els-jish.v2i4.8455>>
- Valentine Queen Chintary, Asih Widi Lestari, 'PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) | Chintary | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)' <<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/244>> [accessed 7 May 2023]
- Wahyuni, Sri. Dkk. 2022. *Literasi Digital Berbasis Pendidikan*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Wiguna, Yoga Teja, Rosmala Dewi, and Nina Angelia, 'Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa', *PERSPEKTIF*, 6.2 (2017), 41–52
<<https://doi.org/10.31289/perspektif.v6i2.2511>>

Zerrer, N. and Sept, A. (2020) 'Smart Villagers as Actors of Digital Social Innovation in Rural Areas', *Urban Planning*, 5(4), pp. 78–88. doi: 10.17645/up.v5i4.3183.